

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Persoalan anggaran di Indonesia menjadi persoalan yang paling urgen dalam tatanan organisasi manapun, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat. Anggaran merupakan asupan utama sebuah kebijakan dan program menuju tujuan kebijakan itu sendiri. Sebaik apapun kepemimpinan dan manajemen dalam sebuah instansi/organisasi, jika anggaran bermasalah atau anggaran tersebut sangat sedikit, kemungkinan akan terjadi perubahan dan pembangunan dalam sebuah instansi/ organisasi tersebut (www.pulausumbawanews.net).

Dalam tatanan pemerintah daerah, jika hanya mengacu kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya pencapaiannya rata-rata masih jauh dibawah 50%, maka tidak mungkin pembangunan tersebut akan tercipta, terlebih dalam anggaran belanja “tidak langsung” jauh lebih tinggi dari “belanja langsung”, sehingga perlu adanya bantuan dana dari luar untuk keperluan suksesi kebijakan yang telah dibuat. Dana dari luar tersebut bisa dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, atau sering disebut dengan dana transfer, atau bisa juga dari investasi jikalau memang ada dan sumber-sumber lainnya (www.pulausumbawanews.net).

Anggaran tidak hanya bergerak di sector publik, namun juga bergerak diberbagai sector lainnya dan dari setiap sector itu tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Indonesia setidaknya selalu mengalokasikan anggaran pendidikan dengan peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2015 pemerintah menganggarkan pendidikan sebesar Rp. 390,3 Triliun atau 21,56 persen dari realisasi APBN 2015 sebesar 1,810 Triliun.

Setelah itu peningkatan terjadi lagi pada tahun 2017 anggaran pendidikan mengalami kenaikan sebesar 20,28 persen atau senilai Rp406 Triliun dari total belanja pemerintah sebesar Rp. 2.001 Triliun pada 2017. Lalu pada tahun 2019 dalam APBN 2019, pemerintah kembali menganggarkan belanja pendidikan sebesar Rp. 492,5 Triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara, pemerintah kembali menganggarkan belanja pendidikan sebesar Rp. 2.461,1 Triliun (www.kompasiana.com).

Masalah anggaran saat ini bukanlah hal menjadi penyebab kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 20 persen (%) dari APBN dianggap sudah cukup mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk memenuhi pendidikan di Indonesia, sehingga harusnya persoalan kualitas pendidikan tidak lagi berkebutuhan mengenai jumlah anggaran. (www.kompasiana.com).

Alim (2008:74) menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan. Dari pengertian tersebut, maka fungsi utama anggaran adalah sebagai salah satu instrumen perencanaan. System penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat (set) komponen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang.

Mardiasmo (2009) mengatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran public merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas. Penganggaran sektor public terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter.

Pada umumnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam melaksanakan aktifitasnya. Karena tujuan yang dikehendaki masyarakat selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga (3) elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2009).

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fhariantana dan Carolina (2012) yang berjudul Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Tujuan penelitian menganalisis anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan fokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tahun 2008-2010. Metode penelitian yaitu Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat/rasio efisiensi

anggaran belanja yang dicapai trennya cenderung menurun dari tahun ketahun, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelolah anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusita Untari (2011) yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011-2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Metode penelitian yaitu analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011-2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) dan juga pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam tingkat efektivitas pada tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Melania Rampengan, Grace B. Nangoi dan Hendrik Manosoh (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Metode penelitian yaitu penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado Tahun 2011-2015 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja organisasi

serta prestasi (keberhasilan) suatu organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang**”.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?
- b. Bagaimanakah efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari persoalan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- b. Untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/I Fak. Ekonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami pengukuran tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi anggaran belanja.

b. Bagi Pemerintah Dinas

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang maupun pihak-pihak yang ada dalam instansi tersebut agar senantiasa bekerja secara transparan, bersih dan berwibawah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.